

ISSN 2303-0356



Jurnal Akuntansi

Volume 3, Nomor 1, Oktober 2015

PENGARUH *DEBT TO EQUITY RATIO*, *PRICE TO BOOK VALUE* DAN *PRICE EARNING RATIO* TERHADAP *EARNING PER SHARE* PERUSAHAAN *CONSUMER GOODS* YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

Munawaroh dan Lismawati

PERSPEKTIF ETNOMETODOLOGI DALAM PROSES PEMBENTUKAN PANDANGAN, PEMAHAMAN, DAN MINAT TERHADAP MEMILIH KONSENTRASI AKUNTANSI SYARIAH

Robiatul Auliyah

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN ALOKASI KHUSUS TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA SE-SUMATERA BAGIAN SELATAN

Abdullah, Dri Asmawanti S, dan Febriansyah

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI *FRAUD* PENGADAAN BARANG/JASA PADA LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH DI KOTA BENGKULU

Rahmad Hidayat dan Fadli

PERCEPTION OF ISLAMIC ACCOUNTING BY NON MOSLEM ACCOUNTING STUDENT ((STUDY AT THE UNIVERSITIES OF BENGKULU CITY)

Fenny Marietza, Nila Aprila, Madani Hatta dan Yosila Ariesty

THE EFFECT OF FINANCIAL STATEMENT PRESENTATION AND ACCESSIBILITY OF FINANCIAL STATEMENTS TO THE ACCOUNTABILITY OF FINANCIAL MANAGEMENT GOVERNMENT OF BENGKULU CITY

Nila Aprila, Madani Hatta, Fenny Marietza dan Nala Kresna

Jurnal Akuntansi



Jurusan Akuntansi FE-UNIB
Gedung K, Jalan Raya Kandang Limun Bengkulu
Telp. 0852 66246492
E-mail: jafibunib@yahoo.com

Jurnal Akuntansi

Volume 3, Nomor 1, Oktober 2015

Terbit 3 kali dalam setahun pada bulan Februari, Juni, dan Oktober. Berisi tulisan yang diangkat dari hasil penelitian atau pemikiran akuntansi akademisi, praktisi, mahasiswa dan lain yang relevan bagi pengembangan profesi dan praktek akuntansi di Indonesia.

Penyunting (Editors)

Fadli (Chief Editor)
Saiful (Chief Managing Editor)
Husaini
Abdullah
Nikmah

Mitra Bebestari/Penelaah (Reviewers)

Sylvia Veronica NP. Sinaga (Universita Indonesia)
Dwi Martani (Universitas Indonesia)
Ersa Tri Wahyuni (Universita Padjajaran)
Soekrisno Agoes (Universitas Tarumanegara)
Abdul Rohman (Universitas Diponegoro)
Tarjo (Universitas Trunojoyo Madura)
Joni Pabelum (Universitas Palangkaraya)

Sekretariat (Editorial Secretary)

Dri Asmawanti S

Kantor Penyunting (Editorial Office)

Jurusan Akuntansi FE-UNIB
Gedung K, Jalan Raya Kandang Limun Bengkulu
Telp. 0852 66246492
E-mail: jafebunib@yahoo.com

Redaksi menerima sumbangan tulisan hasil penelitian yang belum pernah diterbitkan dalam media lain. Naskah diketik di atas kertas HVS A4 spasi 1.5 dengan jumlah maksimum 20-30 halaman kertas A4, dengan format seperti yang tercantum pada Kebijakan Editorial

Jurnal Akuntansi

Volume 3, Nomor 1, Oktober 2015

PENGARUH <i>DEBT TO EQUITY RATIO</i> , <i>PRICE TO BOOK VALUE</i> DAN <i>PRICE EARNING RATIO</i> TERHADAP <i>EARNING PER SHARE</i> PERUSAHAAN <i>CONSUMER GOODS</i> YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA Munawaroh dan Lismawati	1
PERSPEKTIF ETNOMETODOLOGI DALAM PROSES PEMBENTUKAN PANDANGAN, PEMAHAMAN, DAN MINAT TERHADAP MEMILIH KONSENTRASI AKUNTANSI SYARIAH Robiatul Auliyah	16
PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN ALOKASI KHUSUS TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA SE-SUMATERA BAGIAN SELATAN Abdullah, Dri Asmawanti S, dan Febriansyah	33
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI <i>FRAUD</i> PENGADAAN BARANG/JASA PADA LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH DI KOTA BENGKULU Rahmad Hidayat dan Fadli	55
<i>PERCEPTION OF ISLAMIC ACCOUNTING BY NON MOSLEM ACCOUNTING STUDENT (STUDY AT THE UNIVERSITIES OF BENGKULU CITY)</i> Fenny Marietza, Nila Aprila, Madani Hatta, Yosila Ariesty	72
<i>THE EFFECT OF FINANCIAL STATEMENT PRESENTATION AND ACCESSIBILITY OF FINANCIAL STATEMENTS TO THE ACCOUNTABILITY OF FINANCIAL MANAGEMENT GOVERNMENT OF BENGKULU CITY</i> Nila Aprila, Madani Hatta, Fenny Marietza dan Nala Kresna	86

**THE EFFECT OF FINANCIAL STATEMENT PRESENTATION AND
ACCESSIBILITY OF FINANCIAL STATEMENTS TO THE
ACCOUNTABILITY OF FINANCIAL MANAGEMENT GOVERNMENT
OF BENGKULU CITY**

Nila Aprila

nila_aprilla@yahoo.com

Madani Hatta

Fenny Marietza

Nala Kresna

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu

ABSTRACT

This study aims to test empirically the effect of financial statement presentation and accessibility of financial statements to the accountability of financial management government of Bengkulu City. The object in this research is a unit of work in the area of device environment Bengkulu City Government. The sample in this research are the officials who worked on the working area of the device unit involved in financial management. The data in this study obtained by distributing the questionnaire directly to the officials and research samples will be processed by using the SPSS program.

Based on the test result it can be concluded that the presentation of the financial statements effect on financial management accountability, while the accessibility of financial statements does not influence on financial management accountability.

Keywords: Financial Statement Presentation, Accessibility Of Financial Statements, Accountability Of Financial Management

PENDAHULUAN

Di zaman demokrasi ini, masalah akuntabilitas pengelolaan keuangan negara terus menjadi perhatian masyarakat Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari keinginan masyarakat terhadap pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Setiap kebijakan pemerintah dituntut agar lebih dapat bersifat akuntabel guna mendapatkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sehingga dapat mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia sebagai negara yang memiliki kehidupan yang berkeadilan dan berkeajahteraan yang merata bagi seluruh rakyatnya.

Pemerintah daerah baik pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota harus melakukan pengelolaan keuangan yang menjadi haknya berdasarkan perundang-undangan. Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel maka pemerintah menganggap perlu untuk menetapkan peraturan pelaksanaan dari undang-undang keuangan yang ada sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya, maka pemerintah

menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pasal 4 ayat 1 PP No. 58/2005 menyebutkan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan lembaga publik ini dapat tercermin atas penyajian laporan keuangan yang berkualitas dari entitas pelaporan lembaga publik tersebut. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 laporan keuangan pemerintah menyajikan informasi mengenai laporan posisi keuangan, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan dalam suatu kebijakan. Dengan kata lain, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Hasil pemeriksaan laporan keuangan Kota Bengkulu yang dilakukan oleh BPK dalam website resminya (www.bpk.go.id) menunjukkan bahwa dalam 5 tahun terakhir sejak tahun 2009 hingga tahun 2013 untuk Pemerintah Kota Bengkulu hanya satu kali memperoleh hasil opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yakni pada tahun 2011, sedangkan pada tahun kerja lainnya yakni pada tahun 2009, 2010, 2012, dan 2013 memperoleh hasil opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Hasil opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang diperoleh pemerintah Kota Bengkulu maka laporan keuangannya menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), akan tetapi masih ada pengecualian dalam hal-hal tertentu. Sehingga dapat diindikasikan bahwa masih terdapat masalah dalam penyajian laporan keuangan dan aksesibilitasnya. Padahal para pengguna laporan keuangan berhak mendapat kemudahan dalam mengakses informasi laporan keuangan. Namun masalah aksesibilitas laporan keuangan ini merupakan suatu masalah yang sering terjadi. Laporan keuangan yang semestinya terbuka, akurat dan jujur, kini keakuratannya dipertanyakan akibat kurang baiknya pelayanan dan publikasi laporan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah sehingga dapat dicurigai terjadi manipulasi terhadap data laporan keuangan yang menyebabkan pertanyaan terhadap akuntabilitas publik pemerintah Kota Bengkulu. Sebagaimana kita ketahui akuntabilitas yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan pertanggungjawaban maupun laporan temuan yang dapat dibaca dan dipahami. Dengan uraian di atas penulis sangat tertarik mengadakan penelitian “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Bengkulu”.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya maka dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah?
2. Apakah aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah?

TINJAUAN PUSTAKA

Stakeholder Theory

Menurut Hadi (2011) mengatakan bahwa perusahaan tidak hanya sekedar bertanggungjawab terhadap para pemilik (*shareholder*) sebagaimana terjadi selama ini, namun bergeser menjadi lebih luas yaitu sampai pada ranah sosial kemasyarakatan (*stakeholder*). Untuk itu, tanggungjawab perusahaan yang semula hanya diukur sebatas pada indikator ekonomi (*economic focused*) dalam laporan keuangan, kini harus bergeser dengan memperhitungkan faktor-faktor sosial (*social dimentions*) terhadap *stakeholder*, baik internal maupun eksternal.

Hubungan antara teori *stakeholder* dengan penelitian ini adalah pemerintah selaku *shareholder* yang bertindak sebagai pihak yang dipercaya oleh masyarakat selaku *stakeholder* untuk mengelola sumber daya yang ada. Dalam pengelolaan ini pemerintah dituntut atas pertanggungjawaban atas kinerja yang mereka lakukan, dimana pertanggungjawaban ini dikenal dengan akuntabilitas pemerintah. Akuntabilitas pemerintah dapat dilihat dari laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah, apakah laporan keuangan itu telah tersaji dengan baik dan bisa diakses oleh pengguna laporan keuangan itu sendiri.

Penyajian Laporan Keuangan Daerah

Penyajian laporan keuangan pemerintah merupakan hal yang sangat penting, menurut Diamond (2002), karena pengungkapan atas informasi ini merupakan suatu elemen dasar dari transparansi fiskal dan akuntabilitas. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Informasi yang bermanfaat bagi para pemakai adalah informasi yang mempunyai nilai. Informasi akan bermanfaat apabila informasi tersebut dapat mendukung pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai. Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Informasi akuntansi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah daerah harus mempunyai beberapa karakteristik kualitatif yang disyaratkan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah yang merupakan

prasyarat normatif sebagaimana disebutkan dalam Rerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010) antara lain :

1. Relevan, yaitu informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relevan memiliki unsur-unsur berikut :
 - a) Manfaat umpan balik (*feedback value*). Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
 - b) Manfaat prediktif (*predictive value*). Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
 - c) Tepat waktu (*timeliness*). Informasi yang disajikan secara tepat waktu dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
 - d) Lengkap, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.
2. Andal, yaitu informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi yang andal memenuhi karakteristik berikut:
 - a) Penyajian jujur, Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
 - b) Dapat diverifikasi (*verifiability*), Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
 - c) Netralitas, yaitu informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.
3. Dapat dibandingkan, informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.
4. Dapat dipahami, Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah

Aksesibilitas laporan keuangan memiliki arti sebagai kemudahan seseorang untuk memperoleh informasi laporan keuangan (Mulyana, 2006). Penyajian adalah aspek yang penting dari aksesibilitas. Dengan kata lain laporan keuangan setidaknya harus dapat dimengerti dan tersedia bagi mereka yang tertarik dan mau berusaha untuk memahaminya (Rohman, 2009).

Agar informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, pemerintah daerah harus meningkatkan aksesibilitas laporan keuangannya, tidak sekedar menyampaikannya ke DPRD saja, tetapi

juga memfasilitasi masyarakat luas agar dapat mengetahui atau memperoleh laporan keuangan dengan mudah. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pasal 103, dinyatakan bahwa informasi yang dimuat dalam Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) adalah data terbuka yang dapat diketahui, diakses dan diperoleh oleh masyarakat. Ini berarti bahwa pemerintah daerah harus membuka akses kepada *stakeholder* secara luas atas laporan keuangan yang dihasilkannya, misalnya dengan mempublikasikan laporan keuangan daerah melalui surat kabar, internet, atau cara lainnya.

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Adapun fungsi akuntabilitas meliputi tiga unsur, yaitu (1) *providing information about decisions and actions taken during the course of operating entity*, (2) *having the internal parties review the information*, and (3) *taking corrective actions where necessary*. Suatu entitas yang *accountable* adalah entitas yang mampu menyajikan informasi secara terbuka mengenai keputusan-keputusan yang telah diambil selama beroperasinya entitas tersebut, memungkinkan pihak luar (misalnya legislatif, auditor, atau masyarakat secara luas) *me-review* informasi tersebut, serta bila dibutuhkan harus ada kesediaan untuk mengambil tindakan korektif (Ulum, 2001). Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat.

Berikut ini tabel beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya :

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

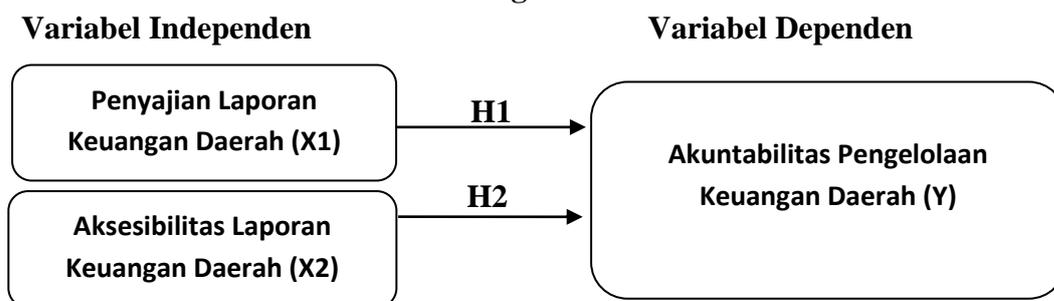
Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
Steccolini (2002)	Penyajian Laporan Keuangan, Akuntabilitas Laporan Keuangan	Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa laporan tahunan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas.
Mulyana (2006)	Penyajian Neraca, Aksesibilitas Laporan Keuangan, Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan	Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa secara terpisah dan bersama-sama penyajian neraca daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Sagala (2011)	Penyajian Laporan Keuangan Daerah,	Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa penyajian laporan keuangan daerah dan

Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
	Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah, Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan	aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah baik secara simultan maupun parsial.
Mustofa (2012)	Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah, Akuntabilitas Laporan Keuangan	Penyajian laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan Penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Sande (2013)	Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah, Akuntabilitas Laporan Keuangan	Penyajian laporan keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Sastra (2013)	Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan, Transparansi Akuntabilitas Laporan Keuangan	Penyajian laporan keuangan daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap transparansi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kota Medan. Aksesibilitas laporan keuangan tidak memiliki pengaruh terhadap transparansi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kota Medan.

Kerangka Pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Gambar1

Kerangka Pemikiran



METODE PENELITIAN

Berdasarkan karakteristik penelitian (Sugiyono, 2013) yang ada maka jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2013).

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Penelitian ini membahas pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan di Kota Bengkulu. Variabel penelitian ini adalah:

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Variabel Dependen)

Secara umum akuntabilitas diartikan sebagai sebuah bentuk kewajiban untuk mempertanggungjawabkan sebuah keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai sasaran yang telah diterapkan untuk periode-periode sebelumnya yang dilakukan secara periodik. Pengukuran Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa untuk mencapai akuntabilitas maka keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Untuk mengetahui indikator tersebut peneliti menggunakan kuesioner yang telah digunakan oleh (Sande, 2013) yang berisi 10 butir pertanyaan. Jawaban atas pertanyaan didesain dengan menggunakan skala *likert* (1= Sangat Tidak Setuju, 2 = Tidak Setuju, 3 = Ragu-ragu, 4 = Setuju, dan 5 = Sangat Setuju).

Penyajian Laporan Keuangan (Variabel Independen)

Penyajian Laporan Keuangan Daerah adalah ketersediaan dan kelengkapan dari penyajian laporan aset, utang, dan ekuitas dana dari pemerintah daerah yang memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Menurut Bastian (2006), penyajian laporan keuangan daerah diukur atas karakteristik kualitatif laporannya yaitu: Relevan (manfaat umpan balik, manfaat prediktif, tepat waktu, lengkap), andal (penyajian jujur, dapat diverifikasi, netralitas), dapat dibandingkan, dapat dipahami, dan kesesuaian laporan keuangan tersebut terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan. Untuk mengetahui indikator tersebut peneliti menggunakan kuesioner yang telah digunakan oleh (Sande, 2013) yang berisi 10 butir pertanyaan. Jawaban atas pertanyaan didesain dengan menggunakan skala *likert* (1= Sangat Tidak Setuju, 2 = Tidak Setuju, 3 = Ragu-ragu, 4 = Setuju, dan 5 = Sangat Setuju).

Aksesibilitas Laporan Keuangan (Variabel Independen)

Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah adalah kemudahan dalam mencari informasi mengenai Laporan Keuangan Daerah misalnya melalui media seperti surat kabar, majalah,

radio, stasiun televisi, dan website (internet). Berdasarkan Permendagri No. 64 Tahun 2013, Aksesibilitas Laporan Keuangan diukur atas:

- 1) Keterbukaan yaitu laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah daerah dipublikasikan secara terbuka bagi pihak-pihak yang berkepentingan.
- 2) Kemudahan yaitu pemerintah daerah harus memberikan kemudahan kepada *stakeholder* dalam memperoleh informasi tentang laporan keuangan daerah.
- 3) *Accesible* yaitu masyarakat dapat mengakses informasi laporan keuangan pemerintah daerah tidak hanya dari kantor SKPD terkait tapi juga melalui media seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi, dan website (internet).

Untuk mengetahui indikator tersebut peneliti menggunakan kuesioner yang telah digunakan oleh (Sande, 2013) yang berisi 3 butir pertanyaan. Jawaban atas pertanyaan didesain dengan menggunakan skala *likert* (1= Sangat Tidak Setuju, 2 = Tidak Setuju, 3 = Ragu-ragu, 4 = Setuju, dan 5 = Sangat Setuju).

Metode Pengambilan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah staf atau pegawai bagian pengelola keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bengkulu. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Tahun 2008 ada 41 SKPD di Kota Bengkulu. Adapun rincian SKPD yang ada di Kota Bengkulu pada tabel 3.1. Sedangkan pemilihan sampel dengan kriteria responden adalah pegawai yang melaksanakan pengelolaan keuangan yang terdiri atas Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran. Jadi sampel penelitian ini berjumlah 4 orang setiap SKPD, sehingga jumlah sampel berjumlah 164 orang.

TABEL 2
SKPD KOTA BENGKULU

Jenis SKPD	Keterangan	Jumlah
Sekretaris Daerah Kota Bengkulu	PERDA No. 8 Tahun 2008	1
Sekretaris DPRD Kota Bengkulu	PERDA No. 8 Tahun 2008	1
Dinas Daerah Kota Bengkulu	PERDA No. 9 Tahun 2008	15
Lembaga Teknis Daerah	PERDA No. 10 Tahun 2008	15
Kecamatan	PERDA No. 11 Tahun 2008	9
TOTAL		41

Sumber : Peraturan Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2008

Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan berupa data primer, yaitu dengan memberikan kuesioner yang telah disiapkan dimana responden dapat menjawab pertanyaan sesuai dengan persepsinya. Menurut Ghazali (2013) kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kuesioner ini diserahkan kepada staf atau pegawai pengelola keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bengkulu. Kuesioner ini dikumpulkan dengan cara mengantar langsung kepada responden, dan jika memungkinkan kuesioner akan

langsung diambil kembali setelah diisi oleh responden. Akan tetapi, jika tidak memungkinkan maka kuesioner akan diambil paling lambat satu minggu setelah penyerahan atau sesuai dengan waktu yang telah disepakati dengan responden. Sebelum kuesioner diambil, kuesioner terlebih dahulu dicek kelengkapannya. Selanjutnya akan diolah dengan menggunakan program SPSS.

Metode Analisis Data

Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini akan menggunakan teknik statistik deskriptif dan *inferensial* dalam menganalisis data *multivariate*. Tujuan penelitian disamping selain mendeskripsikan distribusi data, juga menguji dependensi dan independensi antar variabel. Analisis dependensi merupakan metode statistik dalam analisis *multivariate* yang digunakan untuk menjelaskan dan memprediksi satu atau lebih variabel dependen berdasarkan beberapa variabel independen. Analisis interdependensi merupakan metode statistik dalam analisis *multivariate* yang digunakan untuk mengetahui struktur dari sekelompok variabel atau objek. Model dan teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan regresi linier berganda, dengan melakukan pengujian kualitas data, pengujian asumsi klasik, dan pengujian hipotesis.

Dalam penelitian ini pengujian hipotesis yang digunakan adalah analisis regresi berganda (*multiple regression analysis*) yang digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan persamaan:

$$APK = \alpha + \beta_1 PLK + \beta_2 ALK + e$$

Dimana :

APK = Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

PLK = Penyajian Laporan Keuangan

ALK = Aksesibilitas Laporan Keuangan

β_1, β_2 = Koefisien Regresi

α = Konstanta

e = Error

Untuk dapat melihat layak tidaknya regresi maka dilihat nilai F. Apabila nilai F signifikan maka regresi dapat dikatakan layak. Untuk melihat variabel penyajian laporan keuangan (H1) dan aksesibilitas laporan keuangan (H2) terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan yaitu dengan melihat nilai sig. Apabila nilai sig di bawah 0,05 maka dapat dikatakan penyajian laporan keuangan (H1) dan aksesibilitas laporan keuangan (H2) berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan, tetapi apabila diatas 0,05 dapat dikatakan variabel tersebut tidak berpengaruh. Selanjutnya, untuk melihat arah pengaruh maka dilihat koefisien regresi. Apabila koefisien regresi positif berarti pengaruh positif dan apabila koefisien regresi negatif berarti pengaruh negatif. Untuk melihat berapa persentase besarnya pengaruh kedua variabel independen terhadap variabel dependen dilihat dari *adjusted R square*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Data

Responden penelitian ini adalah para pegawai di bagian keuangan yaitu Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran pada SKPD Kota Bengkulu. Dari 41 SKPD yang ada di Kota Bengkulu hanya 36 SKPD yang dapat dijadikan objek penelitian, sedangkan 5 SKPD tidak dapat dijadikan objek penelitian karena tidak mampu mengembalikan kuesioner sesuai dengan waktu yang ditentukan. Kuesioner didistribusikan sebanyak 164 paket. Dari 164 paket kuesioner yang disebar hanya 134 kuesioner (81,71%) yang kembali, sedangkan 30 (18,29%) kuesioner tidak kembali. Dari jumlah kuesioner yang kembali tersebut, selanjutnya dilakukan pengecekan pada setiap paket, ada sebanyak 2 paket kuesioner yang tidak diisi lengkap dan tidak masuk dalam kriteria sehingga tidak layak dilakukan analisis. Sedangkan sisanya 132 kuesioner diisi lengkap dan digunakan sebagai unit analisis. Secara lebih jelas tingkat pengembalian kuesioner dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3
Rincian Tingkat Pengembangan Kuesioner

Rincian	Jumlah (Eks)	Persentase (%)
Kuesioner yang disebar	164	100,00
Kuesioner yang kembali	134	81,71
Kuesioner yang tidak kembali	30	18,29
Kuesioner yang tidak dapat diolah	2	1,22
Kuesioner yang diolah	132	80,49

Sumber : Hasil Penyebaran Kuesioner, 2015

Gambaran Umum Responden

Sebagian besar responden pada penelitian ini berumur antara 31-40 tahun yaitu sebanyak 57 orang (43,18%). Dan berdasarkan jenis kelaminnya responden didominasi oleh perempuan yaitu sebanyak 69 orang (52,27%). Jabatan responden yang ditempatkan sebagai PPK sebanyak 36 orang (27,3%), sebagai PPTK sebanyak 36 orang (27,3%) dan bendahara sebanyak 70 orang (45,4%). Kemudian dapat diketahui bahwa sebagian besar responden berpendidikan S1 yaitu sebanyak 97 orang (73,49%). Selain itu pada masa kerja, responden lebih banyak pada kisaran lebih dari 5 tahun yaitu 86 orang (65,15%). Jika dilihat dari usia, pendidikan, dan masa kerja maka diyakini responden dalam penelitian ini dapat memahami pernyataan-pernyataan yang terkait dengan penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Rincian untuk gambaran umum responden yang terjaring melalui penyebaran kuesioner dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4
Gambaran Umum Responden

Profil Responden	Jumlah (orang)	Presentase (%)
Umur		
1. 20-30 tahun	32	24,24%
2. 31-40 tahun	57	43,18%
3. > 40 tahun	43	32,58%
Total	132	100%
Jenis Kelamin		
1. Laki-Laki	63	47,73%
2. Perempuan	69	52,27%
Total	132	100%
Jabatan		
1. PPK	36	27,3%
2. PPTK	36	27,3%
3. Bendahara	60	45,4%
Total	132	100%
Pendidikan Terakhir		
1. S2	24	18,18 %
2. S1	97	73,49 %
3. D3 dan SMA Sederajat	11	8,33 %
Total	132	100 %
Masa Kerja		
1. < 5 Tahun	46	34,85 %
2. > 5 Tahun	86	65,15 %
Total	132	100 %

Sumber: Data diolah, 2015

Statistik Deskriptif

Sebagaimana telah diketahui sebelumnya bahwa penelitian ini difokuskan pada variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan, penyajian laporan keuangan, dan aksesibilitas laporan keuangan. Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskriptif suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, *range*, kurtosis dan *skewness* (kemenangan distribusi) (Ghozali, 2013). Statistik deskriptif dalam penelitian ini disajikan pada tabel adalah sebagai berikut:

Tabel 5
Statistik Deskriptif

Variabel	n	Kisaran Teoritis		Mean Teoritis	Kisaran Aktual		Mean Aktual	Standar Deviasi
		Min	Maks		Min	Maks		
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan	13 2	10	50	30	30	50	41,86	3,670
Penyajian Laporan Keuangan	13 2	10	50	30	30	50	42,30	3,430
Aksesibilitas Pengelolaan Keuangan	13 2	3	15	9	6	15	11,00	1,890

Sumber: Data Primer yang diolah, 2015

Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa jawaban responden terhadap pernyataan variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan, menunjukkan nilai rata-rata aktual lebih besar daripada nilai rata-rata teoritis yaitu $41,86 > 30$, maka dapat dikatakan bahwa pegawai pengelolaan keuangan SKPD di Kota Bengkulu telah melakukan pengelolaan keuangan secara bertanggungjawab. Nilai standar deviasi variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan adalah sebesar 3,670. Hal ini menunjukkan bahwa respon narasumber terhadap pernyataan mengenai variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan memperoleh jawaban yang bervariasi.

Variabel penyajian laporan keuangan menunjukkan nilai rata-rata aktual lebih besar daripada nilai rata-rata teoritis yaitu $42,30 > 30$, maka dapat dikatakan bahwa pegawai pengelolaan keuangan SKPD di Kota Bengkulu telah melakukan penyajian laporan keuangan secara relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan. Nilai standar deviasi untuk variabel penyajian laporan keuangan sebesar 3,430. Hal ini menunjukkan bahwa respon narasumber terhadap pernyataan mengenai variabel penyajian laporan keuangan memperoleh jawaban yang bervariasi.

Variabel aksesibilitas laporan keuangan menunjukkan nilai rata-rata aktual lebih besar daripada nilai rata-rata teoritis yaitu $11,00 > 9$, maka dapat dikatakan bahwa pegawai pengelolaan keuangan SKPD di Kota Bengkulu memiliki kemudahan dalam memperoleh informasi mengenai laporan keuangan. Kemudian nilai standar deviasi untuk variabel aksesibilitas laporan keuangan sebesar 1,890. Hal ini menunjukkan bahwa respon narasumber terhadap pernyataan mengenai variabel aksesibilitas laporan keuangan memperoleh jawaban yang tidak bervariasi.

Hasil uji validitas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 6
Hasil Uji Validitas

Variabel	Pearson Correlation (Validitas)	Signifikan	Keterangan
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan	0.410** - 0.710**	0.000 – 0.000	Valid
Penyajian Laporan Keuangan	0.487** - 0.668**	0.000 – 0.000	Valid
Aksesibilitas Laporan Keuangan	0.725** - 0.889**	0.000 – 0.000	Valid

Sumber: Data Primer yang diolah, 2015

**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Dari hasil analisis yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa seluruh item pernyataan untuk variabel penelitian adalah valid, yakni data sudah benar dan dapat diterima oleh sistem. Hal ini dapat dilihat pada tabel dimana nilai signifikansi seluruh variabel memiliki nilai *pearson correlation* < 0.05.

Hasil Uji Reliabilitas

Tabel 7
Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	N	Cronach's Alpha	Batas Reliabilitas	Ket
1	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan	132	0,718	>0,70	Reliabel
2	Penyajian Laporan Keuangan	132	0,733	>0,70	Reliabel
3	Aksesibilitas Laporan Keuangan	132	0,744	>0,70	Reliabel

Sumber: Data Primer yang diolah, 2015

Berdasarkan tabel menunjukkan bahwa koefisien *cronbach's alpha* terhadap variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan, penyajian laporan keuangan, dan aksesibilitas laporan keuangan masing-masing bernilai >0,7. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah *reliable*, yakni data sudah konsisten dan sesuai dengan kenyataan sebenarnya.

Hasil Uji Normalitas

Tabel 8
Hasil Uji Normalitas

Variabel	Kolmogorov-Smirnov-Test	Asymp.Sig. (2-tailed)	Ket
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan	1,114	0,167	Normal
Penyajian Laporan Keuangan	0,994	0,276	Normal
Aksesibilitas Laporan Keuangan	1,306	0,066	Normal

Sumber: Data Primer yang diolah, 2015

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa nilai probabilitas (*Asymp.sig.*) *Kolmogorov-Smirnov* variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan, penyajian laporan keuangan, dan aksesibilitas laporan keuangan lebih besar dari 0,05. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal.

Hasil Uji Multikolinearitas

Tabel 9
Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Penyajian Laporan Keuangan	0,998	1,002	Bebas Multikolinieritas
Aksesibilitas Laporan Keuangan	0,998	1,002	Bebas Multikolinieritas

Sumber: Data Primer yang diolah, 2015

Berdasarkan pada tabel diatas, hasil uji melalui *Variance Inflation Factor* (VIF) bahwa variabel penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan menghasilkan nilai *tolerance* > 0,1 dan *Variance Inflation Factor* (VIF) < 10. Sehingga dalam model regresi ini tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen tersebut.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Tabel 10
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig	Keterangan
Penyajian Laporan Keuangan	0,196	Bebas Heteroskedastisitas
Aksesibilitas Laporan Keuangan	0,116	Bebas Heteroskedastisitas

Sumber: Data Primer yang diolah, 2015

Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa variabel penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan dalam penelitian ini memiliki nilai sig > 0.05, sehingga semua variabel bebas heteroskedastisitas.

Hasil Pengujian Hipotesis

Tabel 11
Hasil Uji Hipotesis

Variabel	Koefisien Regresi	Nilai t	Nilai p (sig)	Keterangan
Konstanta	15,926	4,416	0,000	
PLK (X1)	0,595	7,610	0,000	Diterima
ALK (X2)	0,070	0,491	0,625	Ditolak
<i>R Square</i>	0,312			
<i>Adjusted R²</i>	0,302			
<i>F</i>	2,9284			
<i>Sig.</i>	0,000			

Sumber: Data Primer yang diolah, 2015

Dari hasil uji hipotesis, bahwa nilai *adjusted R square* sebesar 30,2% menunjukkan bahwa variabel dependen yaitu akuntabilitas pengelolaan keuangan dipengaruhi oleh variabel independen yaitu penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan sebesar 30,2%. Sedangkan sisanya sebesar 69,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Untuk nilai F dari penelitian ini adalah sebesar 2,9281 dengan signifikansi 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi adalah *fit* (layak).

Hasil pengujian hipotesis pertama, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi (*Sig. t*) dari variabel bebas penyajian laporan keuangan adalah 0,000 (kurang dari 0,05) dan nilai koefisien regresi (β) sebesar 0,556 sehingga **H₁ dapat diterima**. Hal ini membuktikan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan. Ini berarti bahwa semakin baik penyajian laporan keuangan maka akuntabilitas pengelolaan keuangan akan semakin baik pula.

Hasil pengujian hipotesis kedua, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi (*Sig t*) dari variabel bebas aksesibilitas laporan keuangan adalah 0,625 (lebih dari 0,05) dan nilai koefisien regresi (β) sebesar 0,036 sehingga **H₂ tidak dapat diterima**. Hal ini menunjukkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan. Ini berarti bahwa sebaik apapun aksesibilitas laporan keuangan yang telah dilakukan, itu tidak dapat menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolannya telah baik pula.

PEMBAHASAN

Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

Penyajian laporan keuangan yang baik adalah salah satu faktor untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Oleh sebab itu pemerintah daerah harus bisa menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Berarti semakin baik penyajian laporan keuangan pemerintah daerah maka akan berimplikasi terhadap peningkatan terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Sebagai organisasi yang mengelola dana masyarakat (*stakeholder*), organisasi sektor publik (*shareholder*) harus mampu memberikan pertanggungjawaban publik melalui laporan

keuangannya. Seperti yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan komersial, informasi berupa laporan keuangan seharusnya merupakan hasil dari sebuah proses akuntansi. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan unit-unit Pemerintahan Daerah dalam hal ini yakni Satuan Kerja Perangkat Daerah. Informasi yang dihasilkan laporan keuangan tersebut menggambarkan bagaimana pengelolaan keuangan yang dilakukan setiap SKPD. Sehingga untuk menunjukkan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang baik, maka tiap-tiap SKPD harus melaksanakan penyajian laporan keuangan dengan baik pula.

Dari hasil analisis disimpulkan bahwa penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan disimpulkan pula bahwa pegawai pengelolaan keuangan SKPD di Kota Bengkulu telah melakukan penyajian laporan keuangan secara relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan. Sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa semakin baik penyajian laporan keuangan maka akuntabilitas pengelolaan keuangan akan semakin baik pula.

Jadi dengan adanya penyajian laporan keuangan yang baik maka dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Semakin baik penyajian laporan keuangan tentu akan memperjelas pelaporan keuangan pemerintah daerah karena semua transaksi keuangan dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada dan akan disajikan dengan lengkap dan jujur dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian diharapkan dapat mengurangi kelalaian dan kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Sehingga pengelolaan keuangan daerah dapat dipertanggungjawabkan dengan baik dan pada akhirnya dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Steccolini (2002), Mulyana (2006), Sagala (2011), Mustofa (2012), Sande (2013), Sastra (2013) yang juga mendapatkan hasil yang sama yaitu penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

Berdasarkan hasil analisis disimpulkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan. Kemudian disimpulkan juga bahwa pegawai pengelolaan keuangan SKPD di Kota Bengkulu memiliki kemudahan dalam memperoleh informasi mengenai laporan keuangan. Oleh karena itu dapat dijelaskan bahwa tentu saja pegawai yang terlibat dalam pengelolaan keuangan SKPD memiliki akses yang baik terhadap laporan keuangan dikarenakan mereka adalah orang-orang yang terlibat dalam pembuatan laporan keuangan itu. Sehingga ketika pejabat SKPD tersebut ditempatkan sebagai responden yang menilai akuntabilitas pengelolaan keuangan dari faktor aksesibilitas laporan keuangannya, maka mereka tidak perlu mempertimbangkan aksesibilitas laporan keuangan tersebut sebagai salah satu faktornya.

Lain halnya jika penelitian ini dilakukan dengan melihat pandangan pengguna eksternal laporan keuangan yang dihasilkan Pemerintah Kota Bengkulu, maka akses terhadap laporan keuangan akan menjadi faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Bengkulu. Karena sebagaimana diketahui pengguna eksternal

laporan keuangan daerah memerlukan akses terhadap laporan keuangan guna menilai akuntabilitas keuangan pemerintah.

Jadi, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mulyana (2006), Sagala (2011), Mustofa (2012), dan Sande (2013) yang memperoleh hasil penelitian bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Namun hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sastra (2013) yang memperoleh hasil penelitian bahwa aksesibilitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap transparansi akuntabilitas pengelolaan keuangan.

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Bengkulu. Sehingga peneliti mendapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyajian laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Bengkulu. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik penyajian laporan keuangan maka semakin baik pula akuntabilitas pengelolaan keuangannya.
2. Aksesibilitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Bengkulu. Hal ini menunjukkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan daerah yang baik tidak dapat menjadi gambaran atas akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Implikasi Hasil Penelitian

Implikasi yang dapat dibuat dari hasil penelitian yang telah dilakukan ialah sebagai berikut:

1. Dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kota Bengkulu dalam menilai pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Bengkulu. Selain itu dengan adanya penelitian ini maka Pemerintah Kota Bengkulu dapat melakukan perbaikan dan pembenahan dalam penyajian laporan keuangan guna meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan.
2. Dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kota Bengkulu untuk melaksanakan fungsi, tugas dan tanggung jawab dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangannya. Hasil penelitian ini juga diharapkan akan dapat memberikan sumbangsih dan kontribusi referensi pemikiran bagi penelitian selanjutnya dalam lingkup yang lebih luas.

Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini masih memiliki keterbatasan yang memerlukan perbaikan dan pengembangan dalam penelitian yang akan datang. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini menggunakan metode survei melalui kuesioner, peneliti tidak terlibat langsung dalam aktivitas di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bengkulu sehingga kesimpulan yang diambil hanya berdasarkan pada data yang dikumpulkan melalui penggunaan instrumen secara tertulis.

2. Penelitian ini hanya menggunakan variabel penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pemerintah yang pengaruh variabel independennya sebesar 30,2% sedangkan sisanya 69,8% disebabkan faktor lain.

Saran

Sesuai penelitian yang telah peneliti lakukan, maka saran yang dapat peneliti berikan ialah sebagai berikut:

1. Metode pengambilan data hendaknya tidak hanya didasarkan pada data kuesioner saja, tetapi juga didasarkan pada wawancara dan observasi lapangan, sehingga analisis dan kesimpulan yang diambil lebih representatif dan objektif.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel lain yang bisa mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan seperti transparansi dan ketepatan waktu laporan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Diamond, Jack. 2002. *Performance Budgeting-Is Accrual Accounting Required?*. IMF Working Paper. Fiscal Affairs Department.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program*, Edisi 7. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hadi, Nor. 2011. *Corporate Social Responsibility*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ismail, Mohamad, Sjahrudin Rasul dan Haryono Umar. 2004. *Konsep dan Pengukuran Akuntabilitas*. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti.
- Mardiasmo. 2001. *Pengawasan, Pengendalian dan Pemeriksaan Kinerja Pemerintah daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- _____. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- _____. 2006. "Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik": Suatu Sarana Good Governace, *Jurnal Akuntansi Pemerintahan* Vol. 2, No.1, Mei 2006.
- Mulyana, Budi. 2006. Pengaruh Penyajian Neraca Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*.
- Mursyidi. 2009. *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Mustofa, Anies Iqbal. 2012. Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pematang. *Accounting Analysis Journal 1*
- Nasution, Saufi Iqbal. 2009. *Pengaruh Penyajian Neraca SKPD dan Aksesibilitas Laporan Keuangan SKPD Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan SKPD di Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara*. Skripsi. USU.
- Nordiawan, Deddi. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

- _____. 2004. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- _____. 2004. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan antara Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah.
- _____. 2014. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- _____. 2011. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- _____. 2013. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah
- _____. 2005. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- _____. 2010. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Rohman, Abdul. 2009. *Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Fungsi Pengawasan dan Kinerja Pemerintah daerah (Survey Pada Pemda di Jawa Tengah)*, Jurnal Akuntansi. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Safitri, Ratna Amalia, 2009, *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Penggunaan Informasi Keuangan Daerah (Studi Empiris Di Kabupaten Semarang)*, Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
- Sagala, Marjuki. 2011. *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Studi Empiris Di Kabupaten Samosir*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.
- Sande, Peggy. 2013. *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat)*. Jurnal Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Shende, Suresh dan Tony Bennet. 2004. *Concept Paper 2: Transparency and Accountability in Public Financial Administration*. UN DESA.
- Steccolini, Ileana. 2002. *Local Government Annual Report: an Accountability Medium?*. EIASM Conference on Accounting and Auditing in Public Sector Reforms. Dublin. September 2002.
- Sujana. 2002. *Metode Statistika*. Bandung: Tarsito.
- Sugiyono. 2013. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Ulum, Ihyaul. 2001. *Akuntabilitas Publik dalam Pengelolaan dan Pengawasan Keuangan Daerah*. <http://ihyaul.staff.umm.ac.id/2010/02/akuntabilitas-publik-dalam-pengelolaan-dan-pengawasan-keuangan-daerah/> [11 Mei 2015]